

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

TRI WULAN II TAHUN 2026



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
MATARAM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

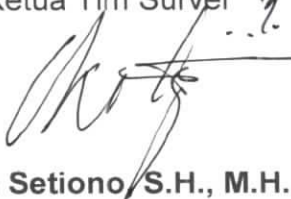
Di sahkan di Mataram
Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2026

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram



AK Setiyono, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei



Joko Setiono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1.1
Maksud Dan Tujuan	1.2
Landasan Hukum	1.3
Rencana Kerja	1.4
BAB II METODELOGI	2
Metode Penelitian	2.1
Populasi Dan Sampel	2.3
Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	2.4
Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	2.5
Teknik Analisis Data	2.6
Tahapan pelaksanaan	2.7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	3
Profil responden.....	3.1
Indeks persepsi Korupsi per indikator.....	3.2
Indeks Persepsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	3.3
BAB IV PENUTUP	4
Kesimpulan	4.1
Rekomendasi	4.2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup memadai, yang saat ini sedang dipersiapkan untuk menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana:
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan:
 - Kuesioner;
 - Kelengkapan peralatan;
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.
- Pelaksanaan Pengumpulan Data
Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.
- Metode Survei
Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METOLOGI

A. Metode Penelitian:

Penelitian Persepsi Anti Korupsi ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel:

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. **Accidental sampling** adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis:

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control:

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 10 responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei. Ketua tim akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

E. Teknik Analisis Data:

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 0-4. Dimana nilai 0 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 0–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 0–4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan pelaksanaan:

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Diskriminasi
2	Perbuatan Curang
3	Hadiah
4	Transparansi Biaya
5	Percaloan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi Persen (%)	Mutu	Kinerja
1	0.0 – 1.0	0.00 – 25.0	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.1 – 2.0	25.1 – 50.0	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.1 – 3.0	50.1 – 75.0	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.1 – 4.0	75.1 – 100.0	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Profil Responden

A. Tingkat Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang Jenis kelamin, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mayoritas memiliki Jenis Kelamin Laki-laki.

Tabel 4.

Jenis Kelamin Responden

JENIS KELAMIN	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
LAKI-LAKI	19	63,33
PEREMPUAN	11	36,67
TIDAK MENGISI	0	-
TOTAL RESPON	30	100,00

B. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang Tingkat Pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mayoritas memiliki Tingkat pendidikan yang Tinggi.

Tabel 5.

Tingkat Pendidikan Responden

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
SD	0	-
SMP	0	-
SLTA/Sederajat	6	20,00
SARJANA (S1)	19	63,33
PASCASARJANA (S2)	0	-
DOKTOR (S3)	0	-

DIPLOMA 1	0	-
DIPLOMA 2	0	3,33
DIPLOMA 3	1	3,33
TIDAK SEKOLAH	4	13,33
TOTAL RESPON	30	100,00

C. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mencantumkan Pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 6.
Jenis Pekerjaan Responden

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
PNS	0	-
TNI	0	-
POLRI	0	-
SWASTA	5	16,67
WIRAUUSAHA	9	30,00
ADVOKAT	9	30,00
BURUH	0	-
PELAJAR/MAHASISWA	5	16,67
LAIN-LAIN	2	6,67
TOTAL RESPON	30	100,00

D. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan kelompok usia, menunjukkan rentang usia sebagai berikut :

Tabel 7.
Usia Responden

RENTANG USIA	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
<19	1	3,33
20-29	6	20,00
30-39	20	66,67
40-49	3	10,00
50<	0	-
TIDAK MENGISI	0	-
TOTAL RESPON	30	100,00

E. Indeks Indikator Diskriminasi

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi ini menunjukkan hasil pada index 4,00 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersih dari diskriminasi.

Tabel 8.
Indeks pada Indikator Diskriminasi

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	6	28	100,00	168
2	5	1	3,57	5
3	4	1	3,57	4
4	3	0	-	0
5	2	0	-	0
6	1	0	-	0
TOTAL		30	107,14	177
NRR		3,93		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

F. Indeks Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,96 Indeks dapat

diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersih dari perbuatan curang.

Tabel 9.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN(%)	TOTAL NILAI
1	6	28	100,00	168
2	5	2	7,14	10
3	4	0	-	0
4	3	0	-	0
5	2	0	-	0
6	1	0	-	0
TOTAL		30	107,14	178
NRR		3,96		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

G. Indeks Indikator Hadiah

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Maka Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tidak pernah menerima hadiah dalam pelayanan dari para pihak.

Tabel 10.

Indeks pada Indikator Hadiah

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN(%)	TOTAL NILAI
1	6	28	100,00	168
2	5	2	7,14	10
3	4	0	-	0
4	3	0	-	0
5	2	0	-	0
6	1	0	-	0
TOTAL		30	107,14	178
NRR		3,96		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

H. Indeks Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sangat transparan dalam pengelolaan biaya.

Tabel 11.

Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN(%)	TOTAL NILAI
1	6	28	100,00	168
2	5	1	3,57	5
3	4	1	3,57	4
4	3	0	-	0
5	2	0	-	0
6	1	0	-	0
TOTAL		30	107,14	177
NRR		3,93		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

I. Indeks Indikator Percaloan

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tidak terdapat praktek percaloan.

Tabel 12.

Indeks pada Indikator Percaloan

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN(%)	TOTAL NILAI
1	6	28	100,00	168
2	5	1	3,57	5
3	4	1	3,57	4
4	3	0	-	0
5	2	0	-	0
6	1	0	-	0

TOTAL	30	107,14	177
NRR	3,93		
KATEGORI	(BERSIH DARI KORUPSI)		

Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebesar 3,94

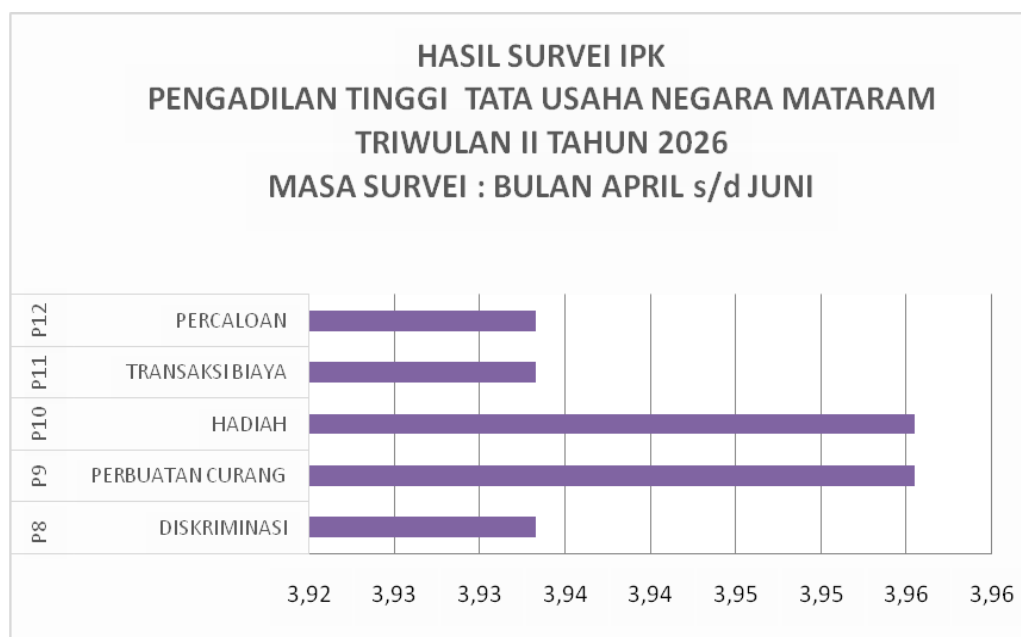
Tabel 18.

Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

KODE	RUANG LINGKUP	NILAI	KATEGORI
Q1	DISKRIMINASI	3,93	(BERSIH DARI KORUPSI)
Q2	PERBUATAN CURANG	3,96	(BERSIH DARI KORUPSI)
Q3	HADIAH	3,96	(BERSIH DARI KORUPSI)
Q4	TRANSAKSI BIAYA	3,93	(BERSIH DARI KORUPSI)
Q5	PERCALOAN	3,93	(BERSIH DARI KORUPSI)
PERSEPSI ANTI KORUPSI (PAK)		3,94	
(BERSIH DARI KORUPSI)			

Tabel 19.

Ringkas Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM



PENGOLAHAN HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)										
PER RESPONDEN DAN RUANG LINGKUP SURVEI										
TRI WULAN II APRIL - JUNI 2026										
NILAI RUANG LINGKUP SURVEI										
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025										
No.	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1	HANI USMANDANI, SH	37	S1	Perempuan	Advokat	6	6	6	6	6
2	Keba Pala Ndima, S.H.	38	S1	Laki-laki	Advokat	6	6	6	6	6
3	Angela Lerontina Putri Sillado, S.H.	32	S1	Perempuan	Advokat	6	6	6	6	6
4	ANTONIUS KLAU, SH	36	S1	Laki-laki	Advokat	6	6	6	6	6
5	Kapistrano Celina Ceme, S.H	35	S1	Perempuan	Advokat	6	6	6	6	6
6	Friedom Yois Radjah, SH	37	S1	Laki-laki	Advokat	6	6	6	6	6
7	EMANUEL PASSAR, SH	36	S1	Laki-laki	Advokat	6	6	6	6	6
8	TESAR SHAN DEMAS HABABA	27	Diploma 3	Laki-laki	Swasta	6	6	6	6	6
9	Lulu Bensneyder Manoe	34	S1	Perempuan	Swasta	6	6	6	6	6
10	CATARINA K. T PUNGKASARI	35	Diploma 2	Perempuan	Swasta	6	6	6	6	6
11	YENI VELMENDI LONA	33	S1	Perempuan	Lainnya	6	6	6	6	6
12	ERASMUS LONA	28	S1	Perempuan	Wirausaha	6	6	6	6	6
13	M. Naufal Rizquillah	19	ILTA/Sederajat	Laki-laki	Pelajar / Mahasiswa	4	5	5	4	4
14	IMAM PRATNA	21	ILTA/Sederajat	Laki-laki	Pelajar / Mahasiswa	6	6	6	6	6
15	RIDHO MAWANA WIRAWAN	22	ILTA/Sederajat	Laki-laki	Pelajar / Mahasiswa	6	6	6	6	6
16	GUSTI BAGUS PANJARYUYOGA	21	ILTA/Sederajat	Laki-laki	Pelajar / Mahasiswa	6	6	6	6	6
17	IDA AYU CHINTYA L.	21	S1	Perempuan	Pelajar / Mahasiswa	6	6	6	6	6
18	LISA LAPASATI	36	ILTA/Sederajat	Perempuan	Swasta	6	6	6	6	6
19	Viki Gusri	37	ILTA/Sederajat	Laki-laki	Swasta	5	5	5	5	5
20	SEM GOTLIF LONA	33	Diploma 3	Perempuan	Wirausaha	6	6	6	6	6
21	BILDAD TORINI M. THONAK, SH	47	S1	Laki-laki	Wirausaha	6	6	6	6	6
22	YOHANA LONA AMANAS	38	S1	Laki-laki	Lainnya	6	6	6	6	6
23	Yohanis Mau Blegur, S.H	45	S1	Laki-laki	Advokat	6	6	6	6	6
24	Jidon Roberto Pello, S.H	34	S1	Laki-laki	Advokat	6	6	6	6	6
25	NAOMI DUJAHU	31	Diploma 3	Perempuan	Wirausaha	6	6	6	6	6
26	IMANUEL TULLE, S.Pd	41	S1	Laki-laki	Wirausaha	6	6	6	6	6
27	PETRUS EDON	38	Diploma 3	Laki-laki	Wirausaha	6	6	6	6	6
28	MELKIANUS NIKSON EDISON AKLILI	36	S1	Laki-laki	Wirausaha	6	6	6	6	6
29	FREDIK OKTOVIANUS DETHAN	36	S1	Laki-laki	Wirausaha	6	6	6	6	6
30	INDRADHI LASMANA	32	S1	Laki-laki	Wirausaha	6	6	6	6	6
JUMLAH PER RL						177	178	178	177	177
NRR PER RL						3,93	3,96	3,96	3,93	3,93
ANGKA MAKSIMAL (RANGE 1-4)						4	4	4	4	4
KONVERSI NILAI KE DALAM PERSEN (%)						98,33	98,89	98,89	98,33	98,33
KATEGORI PER RL						[BERSIH DARI KORUPSI]	[BERSIH DARI KORUPSI]	[BERSIH DARI KORUPSI]	[BERSIH DARI KORUPSI]	[BERSIH DARI KORUPSI]
TOTAL TERTIMBANG DALAM PERSEN (%)						492,78				
TOTAL NRR TERTIMBANG DALAM PERSEN (%)						4,93				
TOTAL NRR SURVEI						39,42				
NRR SURVEI						3,94				
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)						[BERSIH DARI KORUPSI]				

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menunjukkan indeks nilai **3,94** yang berarti bahwa satker masuk dalam kategori Bersih dari Korupsi.

4.2 Rekomendasi.

Merujuk pada hasil Survei Persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Triwulan II Periode bulan **April** hingga **Juni** 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,0 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Prestasi ini harus terus ditingkatkan atau paling tidak tetap dipertahankan. Perbaikan di segala aspek, khususnya pembinaan SDM harus terus dilakukan, demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Lampiran :

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 231/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/II/2025, tanggal 6 Februari 2025 Tentang Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram